

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRAC	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
BAB I	
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Metode Penelitian	19
1.5.1 Penelitian Hukum	19
1.5.2 Pendekatan Masalah	19
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	20
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	21
1.6 Sistematika Penulisan	21
BAB II	
2.1 Asuransi Sosial Tenaga kerja.....	22
2.2 Sistem Jaminan Sosial Nasional	26
2.3 Kepesertaan Aparatur Sipil Negara dalam BPJS dan PT TASPEN	39
BAB III	
3.1 Kompensasi Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi ASN Yang Tidak Didaftarkan Di BPJS Ketenagakerjaan	48

3.2 Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh asn yang tidak didaftarkan BPJS
ketenagakerjaan terkait dengan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan
kerja 57

BAB IV

4.1 Kesimpulan 65

4.2 Saran 66

DAFTAR BACAAN 67

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2.) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
- 3.) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
- 4.) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- 5.) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740)
- 6.) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176)
- 7.) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).
- 8.) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kebersertaan Program Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253.